



---

## Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Sektor UMKM di Indonesia

**Viga Qonita Ulinuha**

Universitas Pancasila, Indonesia

\*Email: [viga.qonita89@gmail.com](mailto:viga.qonita89@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam mendukung sektor UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan perpajakan yang diterapkan, seperti pengurangan tarif pajak dan intensif pajak, bertujuan untuk meringankan beban UMKM dan mendorong pertumbuhannya. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan pajak, seperti pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh), intensif pajak, dan kemudahan administrasi pajak untuk mendukung perkembangan UMKM. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi UMKM, tantangan terkait pemahaman peraturan dan administrasi pajak tetap ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang mendukung UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

**Kata kunci:** UMKM, pajak, kebijakan.

### ABSTRACT

*Taxes play an important role in Indonesia's national development, especially in supporting the MSME sector which contributes significantly to GDP and labor absorption. The tax policies implemented, such as reducing tax rates and intensifying taxes, aim to ease the burden on MSMEs and encourage their growth. The Indonesian government implements various tax policies, such as reducing income tax rates, tax intensification, and ease of tax administration to support the development of MSMEs. Although the policy aims to reduce the tax burden for MSMEs, challenges related to understanding tax regulations and administration remain. The results of the study show that tax policies that support MSMEs can increase the growth and competitiveness of this sector. This study uses normative research methods to analyze the impact of tax policies on the growth and development of MSMEs in Indonesia.*

**Keywords:** *msmes, tax, policy.*

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat vital untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Nisa, 2016). Oleh karena itu, pemerintah menganggap kewajiban perpajakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara yang berfungsi sebagai alat pembiayaan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran penting sektor

---

perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rancangan APBN yang disampaikan setiap tahun, di mana terdapat peningkatan kontribusi pajak dari tahun ke tahun (Nangarumba, 2016).

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, dengan berlandaskan pada potensi nasional serta memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat (Nangarumba, 2016). Peraturan umum perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dasar hukum ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara Wajib Pajak dan Pemerintah sebagai pemungut pajak, sehingga keduanya tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses pemungutan pajak (Amari et al., 2024).

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara berkembang seperti Indonesia, maupun di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa (Ramadhan, 2023). Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor ekonomi, sangat penting melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki posisi yang strategis dan krusial dalam perekonomian nasional (Rhussary, 2024). Hal ini disebabkan oleh eksistensi UMKM yang dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah industri yang besar yang tersebar di berbagai sektor ekonomi, potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, serta kontribusinya yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Vanomy, 2021).

UMKM merupakan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang dikelola oleh Masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah (Maria et al., 2024). UMKM sedang mengalami perkembangan yang baik, dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan ini diprediksi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap perekonomian negara (Lubis & Salsabila, 2024).

Pengaruh kebijakan pajak terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari berbagai sisi, baik positif maupun negatif. UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, karena kontribusinya yang besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan penggerak ekonomi lokal (Husaeni & Dewi, 2019). Kebijakan pajak yang lebih sederhana dan transparan dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, seperti melalui sistem pembayaran pajak yang berbasis teknologi seperti e-filing, e-payment, serta pemberian insentif pajak bagi UMKM yang taat. Pembahasan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan menganalisis dampaknya, dapat diketahui apakah kebijakan pajak yang ada mendukung atau malah menghambat keberlanjutan dan ekspansi sektor UMKM serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka (Apip Alansori & Erna Listyaningsih, 2020).

## **METODE**

---

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting karena memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM berperan menyumbang 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini, UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sumber utama penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkembangan UMKM adalah dari sisi perpajakan. Uaya pengembangan bisnis UMKM sudah dirintis oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia sejak tahun 2015. Upaya ini bahkan masuk dalam strategi DJP di dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP tahun 2015 – 2019. Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara resmi sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang, seperti ketentuan mengenai batas waktu pelaporan.

Jenis kebijakan pajak yang berlaku untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Umum dan PPh Final
2. PPh untuk UMKM dapat dikenakan dengan tarif yang lebih rendah atau menggunakan system PPh Final/ PPh Final dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dengan tarif tetap, yang memudahkan dalam perhitungan dan kepatuhan terhadap pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu biasanya tidak diwajibkan untuk memungut PPN. Namun, UMKM yang melebihi batas tersebut harus mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
5. Intensif Pajak
6. Terdapat beberapa intensif pajak diberikan untuk mendukung UMKM, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak untuk sektor tertentu, atau pengurangan pajak bagi investasi di wilayah tertentu.
7. Kebijakan Pajak Daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seerta pajak reklame, dapat berdampak pada UMKM. Kebijakan pajak daerah bisa bervariasi, dan beberapa wilayah mungkin menawaekan kemudahan atau keringanan pajak untuk mendukung UMKM. Pemerintah daerah juga sering meluncurkan program untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh izin usaha dan memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk sertifikasi untuk UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu.

## **Kebijakan Pemotongan Pajak**

---

Dalam beberapa situasi, UMKM bisa mendapat keuntungan dari kebijakan pemotongan pajak, di mana pihak ketiga (seperti Perusahaan besar) akan memotong pajak yang harus dibayar oleh UMKM saat melakukan transaksi.

**Pengurangan Tarif PPh Badan**

Tarif pajak sebesar 12,5% diterapkan pada badan usaha dengan omzet di bawah Rp. 50 Miliar, sebagai bentuk intensif untuk mendukung perkembangan usaha kecil.

**Pembebasan Pajak Penghasilan**

UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp. 500 juta tidak dikenakan kewajiban pajak penghasilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha kecil.

Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu temuan utama dalam survei menunjukkan bahwa banyak pemilik UMKM memandang kebijakan pajak sebagai beban yang cukup berat bagi usaha mereka. Mereka melaporkan kesulitan dalam memahami peraturan pajak yang kompleks, memastikan kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu, serta identifikasi dan memanfaatkan berbagai intensif pajak yang mungkin tersedia. Selain itu, banyak UMKM juga menghadapi tantangan besar terkait dengan beban administrasi pajak yang tinggi, mengingat keterbatasan dalam sumber daya dan kapasitas administrasi mereka.

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, banyak UMKM yang merasa terbebani oleh kewajiban pajak, yang dianggap menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap fasilitas perpajakan untuk para pelaku UMKM. Salah satu momen penting dalam hal ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu (PP 23/2018).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan UMKM di seluruh negeri. Selain menerapkan kebijakan perpajakan yang spesifik bagi UMKM, pemerintah juga memperkenalkan berbagai program lainnya untuk membantu mereka. Contohnya, ada program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, serta skema pembiayaan yang mudah dijangkau. Di samping itu, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara UMKM dengan Perusahaan besar melalui berbagai program kemitraan. Semua langkah ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi UMKM agar dapat berkembang dan pada akhirnya memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Kebijakan pajak untuk UMKM di Indonesia umumnya dirancang untuk mendukung perkembangan bisnis kecil menengah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan intensif atau mengurangi beban pajak, sehingga UMKM dapat tumbuh secara optimal. Misalnya, dengan menetapkan tarif pajak yang lebih rendah, menyederhanakan administrasi pajak, serta memberikan berbagai intensif lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM.

Pemanfaatan intensif pajak oleh pemerintah dapat mendorong penerapan system pajak yang lebih adil, di mana UMKM dengan omzet lebih rendah dikenakan tarif pajak yang lebih ringan, sementara UMKM dengan omzet lebih besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, UMKM diberi kesempatan untuk berkembang terlebih dahulu, sebelum akhirnya memberikan kontribusi pajak yang lebih besar ketika mereka mencapai skala yang lebih besar. Selain itu, pemberian intensif pajak seperti pengurangan pajak penghasilan, pajak pertambah nilai dan keringanan pajak lainnya juga dapat membantu meringankan beban UMKM.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memberikan apresiasi terhadap kebijakan intensif pajak karena dianggap dapat meningkatkan kontribusi dunia usaha dalam mendorong perekonomian nasional, dengan lebih mengutamakan peran pelaku UMKM dibandingkan pelaku usaha besar.

---

Kebijakan intensif pajak ini bertujuan untuk membantu UMKM naik ke level yang lebih tinggi, yaitu usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usah kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah memberlakukan tarif pajak penghasilan (PPh) yang lebih ringan bagi UMKM dengan pendapatan di bawah batas tertentu. Harapannya, kebijakan ini dapat membantu meringankan beban pelaku UMKM dan memberi mereka peluang lebih besar untuk menginvestasikan dana ke dalam usaha mereka.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai dampak kebijakan pajak terhadap UMKM, mulai dari pengaruhnya terhadap investasi, pertumbuhan, dan profitabilitas UMKM, hingga dampaknya terhadap kesetaraan ekonomi dan inklusi keuangan. Namun, masih terdapat banyak aspek dalam hubungan antara kebijakan pajak dan UMKM yang belum sepenuhnya dipahami atau dijelaskan.

Kebijakan pajak memiliki potensi besar sebagai sarana untuk mendorong atau menghalangi pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk merancang kebijakan pajak yang lebih peka terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM. Hal ini mencakup Upaya untuk menyederhanakan regulasi pajak, mengurangi beban administrasi, meningkatkan akses informasi pajak, serta memperluas intensif pajak yang tepat bagi UMKM.

Kebijakan pajak dapat menjadi alat yang kuat dalam mendorong atau menghambat investasi, pertumbuhan, dan daya saing UMKM. Intensif pajak yang terarah dan efisien dapat mendorong UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha mereka, sedangkan tarif pajak yang terlalu tinggi atau system pajak yang tidak sesuai dapat mengurangi daya saing mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang kebijakan pajak yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

Sistem pajak yang efektif tidak hanya mencakup pemberian intensif, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan transparan. Penegakan hukum yang tepat terhadap UMKM yang mencoba menghindari kewajiban pajak akan menciptakan iklim yang setara, di mana semua pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang sama. Penegakan hukum yang objektif dan tanpa bias juga akan memastikan kebijakan pajak mendukung tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga membantu UMKM kecil dan mikro untuk tumbuh dan berkembang.

## **SIMPULAN**

Pajak memiliki peran penting dalam Pembangunan Indonesia karena menjadi sumber pendapatan negara yang vital untuk pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan nasional. Kebijakan perpajakan yang sederhana dan transparan sangat mempengaruhi perkembangan UMKM. UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, berkontribusi 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. UMKM juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dan sumber penciptaan lapangan kerja. Pemerintah memberikan perhatian terhadap perkembangan UMKM, termasuk melalui kebijakan pajak yang memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa kebijakan pajak yang berlaku bagi UMKM antara lain PPh yang lebih rendah, pembebasan PPh untuk omzet di bawah Rp 500 juta, kebijakan PPN, intensif pajak, serta kebijakan pajak daerah.

Meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas pajak, banyak pemilik UMKM yang merasa beban administratif dan peraturan pajak yang kompleks masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyederhanakan regulasi pajak dan memberikan intensif yang meringankan beban UMKM. Selain kebijakan perpajakan, pemerintah juga menyediakan program pelatihan, pendampingan, dan skema pembiayaan yang memudahkan UMKM untuk berkembang.

---

**Viga Qonita Ulinuha**Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Sektor UMKM di Indonesia

---

Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong pertumbuhan UMKM, membantu mereka naik ke level usaha yang lebih besar, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Analisis dampak kebijakan pajak terhadap UMKM penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, N. A. S., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi teknologi digital di era industri. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85–98.
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*. Penerbit Andi.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 48–56.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Maria, V., Situmeang, T., & Ardana, R. F. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 12–36.
- Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(2), 114–130.
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Oleh Perbankan [Policy Impact Analysis of Lending to MSMEs on the Growth of MSMEs Financed by Banks]. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 11(2), 212–234.
- Ramadhan, A. S. (2023). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Central Publisher*, 1(9), 1102–1108.
- Rhussary, M. L. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Kota Samarinda. *Jurnal EMA*, 9(2), 132–139.
- Vanomy, A. E. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 1–12.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).